
Lahirnya Kementerian Agama, Madrasah dan Sekolah Islam

Leo Kusuma¹, Adnan Luthfi Siregar² Fauziah Nasution³

Pendidikan Agama Islam Fakultas Pascasarjana Universitas Syekh Ali Hasan Ahmad Addary
Padangsidempuan, Indonesia

E-mail: leokusuma37@gmail.com¹, adnanluthfi43@gmail.com², fauziahnst@uinsyahada.ac.id³

Article History:

Received: 05 Januari 2026

Revised: 30 Januari 2026

Accepted: 03 Februari 2026

Keywords: Ministry of Religion, Madrasah, Islamic School, Dichotomy of Education, Integration of Education, Joint Decree of 3 Ministers 1974.

Abstract: *This study examines the dynamics of the social history of Islamic education in Indonesia in the post-independence period, which are rooted in the colonial legacy of educational dichotomy between secular general education and traditional religious education. This dichotomy created structural inequalities and generated an urgent need to integrate religious education into the national education system of the newly independent nation-state. The study aims to analyze the roles and development of three key entities—the Ministry of Religious Affairs (MoRA), madrasahs, and Islamic schools—as institutional, integrative, and ideological responses to this problem, as well as their contributions to the formation of national identity and a cohesive national education system. This research employs a qualitative method with a historical-descriptive approach to reconstruct the chronological development of these institutions and to analyze their social impacts. Data were collected through document and literature studies, including government regulations such as Government Regulation No. 1/S.D./1946 and the Joint Decree of the Three Ministers of 1974, historical archives, speeches, and relevant scholarly works. The findings indicate that the establishment of the Ministry of Religious Affairs on January 3, 1946, functioned as an institutional solution by centralizing the management of religious affairs, including education, thereby ending the fragmented governance inherited from the colonial era. Madrasahs evolved from marginal institutions into an integral part of the National Education System, particularly after the 1974 Joint Decree of the Three Ministers, serving as an integrative solution by bridging religious and general curricula. Meanwhile, modern Islamic schools emerged as an ideological response to globalization, emphasizing the synthesis of science and technology with faith and piety, the Islamization of knowledge, pluralism, and religious character formation. Together, these three developments represent interconnected phases in a broader national narrative that successfully dismantled the colonial*

educational dichotomy and reinforced Indonesia's identity as a nation founded upon belief in the One and Only God.

Kata Kunci: Kementerian Agama, Madrasah, Sekolah Islam, Dikotomi Pendidikan, Integrasi Pendidikan, SKB 3 Menteri 1974.

Abstrak: Penelitian ini mengkaji dinamika sejarah sosial pendidikan Islam di Indonesia pascakemerdekaan yang berakar pada dikotomi pendidikan warisan kolonial antara pendidikan umum sekuler dan pendidikan agama tradisional yang terpisah. Dikotomi ini menimbulkan kesenjangan struktural sekaligus mendorong kebutuhan akan integrasi pendidikan agama ke dalam sistem pendidikan nasional negara bangsa yang baru merdeka. Penelitian bertujuan menganalisis peran dan perkembangan tiga entitas utama, yaitu Kementerian Agama (Kemenag), madrasah, dan sekolah Islam, sebagai respons institusional, integratif, dan ideologis terhadap problematika tersebut, serta kontribusinya dalam pembentukan identitas bangsa dan sistem pendidikan nasional yang utuh. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan historis-deskriptif untuk merekonstruksi perkembangan ketiga entitas tersebut secara kronologis dan menganalisis dampak sosialnya. Data dikumpulkan melalui studi dokumen dan literatur, meliputi regulasi pemerintah seperti PP No. 1/S.D./1946 dan SKB 3 Menteri 1974, arsip sejarah, pidato, serta karya ilmiah yang relevan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kemenag, yang berdiri pada 3 Januari 1946, berperan sebagai solusi institusional dengan memusatkan pengelolaan urusan agama dan pendidikan, sehingga mengakhiri fragmentasi pengelolaan warisan kolonial. Madrasah mengalami transformasi dari lembaga marginal menjadi bagian integral Sistem Pendidikan Nasional, terutama setelah SKB 3 Menteri 1974, dan berfungsi sebagai solusi integratif melalui penggabungan kurikulum agama dan umum. Sementara itu, sekolah Islam modern muncul sebagai solusi ideologis dalam menghadapi globalisasi dengan menekankan sintesis iptek dan imtaq serta pembentukan karakter religius. Ketiganya membentuk satu narasi besar yang berhasil mengakhiri dikotomi pendidikan kolonial dan meneguhkan identitas Indonesia sebagai negara berlandaskan Ketuhanan Yang Maha Esa.

PENDAHULUAN

Wacana internasional tentang sistem pendidikan pascakolonial terus-menerus dihadapkan pada tantangan untuk menggabungkan tradisi pengetahuan lokal, yang sering kali memiliki unsur religius, dengan sistem pendidikan modern yang bersifat sekuler yang diturunkan dari kekuatan kolonial. Hal ini menimbulkan perpecahan struktural dan ideologis yang senantiasa memperumit

pengembangan identitas nasional. Sebagaimana yang dicatat oleh Azra (1999), dunia Islam, khususnya, telah lama berjuang untuk mendamaikan pendidikan agama dengan ilmu pengetahuan modern dan struktur negara, sebuah ketegangan yang dapat dilihat mulai dari Maroko hingga Indonesia. Di tingkat nasional, isu ini sangat terasa di Indonesia setelah merdeka. Pemerintah kolonial Hindia Belanda mengimplementasikan sistem pendidikan umum yang berorientasi Barat dan sekuler, sementara pendidikan Islam, seperti pesantren, dianggap sebelah dan dikategorikan sebagai non-formal serta inferior (Shaleh, 2005). Warisan ini menciptakan ketimpangan pendidikan yang signifikan, di mana lulusan dari dua jalur tersebut berada dalam ranah sosial dan intelektual yang terpisah, menghalangi terbentuknya warga negara yang bersatu seperti yang diharapkan oleh para pendiri negara.

Untuk menghadapi masalah yang mendalam ini, negara Indonesia melakukan eksperimen institusional yang berbeda. Alih-alih mengikuti model yang sangat memisahkan urusan agama dan negara, Indonesia mendirikan Kementerian Agama (Kemenag) pada 3 Januari 1946. Para ahli seperti Daulay (2009) mengemukakan bahwa pembentukan Kemenag merupakan kompromi politik yang cerdas dan solusi institusional yang dirancang untuk mengatur urusan agama, termasuk pendidikan, secara terpusat, sehingga memberikan cara yang diatur negara untuk mengatasi pemisahan yang terjadi pada era kolonial. Kebijakan ini menandakan komitmen negara untuk memenuhi amanat konstitusi tentang “Ketuhanan Yang Maha Esa” dan juga untuk memenuhi harapan masyarakat Muslim yang mayoritas. Selaras dengan respons institusional tersebut, muncul inovasi pendidikan dari tingkat dasar. Madrasah modern diciptakan sebagai lembaga hybrid yang memadukan kurikulum umum dan agama, berusaha mengatasi kekurangan pesantren tradisional sekaligus mendapatkan pengakuan resmi (Muhaimin, 2004). Pada akhir abad ke-20, hadirnya Sekolah Islam Modern seperti Sekolah Islam Terpadu (SIT) mencerminkan respon ideologis terhadap globalisasi, yang bertujuan untuk menciptakan sintesis organik antara sains (IPTEK) dan iman (IMTAQ) demi menghasilkan “manusia sempurna” (insan kamil).

Studi yang dilakukan sebelumnya telah mencatat perkembangan ini secara terpisah. Kajian sejarah menjelaskan perjuangan politik di balik pembentukan Kemenag (Sanusi et al., 2022), sedangkan penelitian sosiologis menganalisis perubahan kurikulum madrasah setelah Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri 1974 (Daulay, 2009). Penelitian lainnya telah mengumpulkan model-model dan filosofi dari sekolah-sekolah Islam modern seperti Al-Azhar, Madania, dan Insan Cendekia (Subhan, 2012). Namun, terdapat kekurangan signifikan dalam penelitian yang secara sintetik menganalisis ketiga fenomena Kemenag, Madrasah, dan Sekolah Islam bukan sebagai bagian sejarah yang berdiri sendiri, melainkan sebagai tindakan strategis yang saling berhubungan dan berurutan dalam sebuah proyek nasional yang berkesinambungan untuk menyelesaikan perpecahan dalam pendidikan. Sebagian besar studi terfokus pada satu elemen, mengabaikan hubungan sinergis di mana kebijakan institusional (Kemenag) memungkinkan adanya integrasi formal (Madrasah) yang kemudian membuka peluang bagi inovasi ideologis (Sekolah Islam).

Studi ini bertujuan untuk menjawab kekosongan yang ada. Keunikan penelitian ini terletak pada pengembangan serta penerapan kerangka analisis yang disebut “Sinergi Tiga Pilar”, yang memandang ketiga entitas ini sebagai solusi yang saling melengkapi: Kemenag sebagai solusi institusional, Madrasah sebagai solusi yang bersifat integratif, dan Sekolah Islam sebagai solusi ideologis. Sintesis teoritis ini bersumber dari dokumen-dokumen primer, seperti peraturan pemerintah (contohnya, Penetapan Pemerintah No. 1/S. D. /1946 dan SKB 3 Menteri 1974), pidato-pidato bersejarah, serta dokumen-dokumen yang dibuat oleh pendiri jaringan sekolah

Islam. Inti argumennya adalah bahwa upaya yang konstan untuk membangun sistem pendidikan Indonesia yang modern sekaligus berlandaskan nilai-nilai religius hanya dapat dipahami secara mendalam dengan mempelajari interaksi yang dinamis antara kebijakan negara (Kemenag), transformasi dalam pendidikan formal (Madrasah), dan inovasi pedagogis yang berasal dari masyarakat sipil (Sekolah Islam). Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk menganalisis secara deskriptif jalur sejarah serta peranan masing-masing pilar untuk menunjukkan bagaimana ketiganya secara bersama-sama berkontribusi dalam mengakhiri pemisahan pendidikan kolonial dan memperkuat identitas sosial-religius Indonesia dalam kerangka pendidikan nasionalnya.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini mengadopsi pendekatan kualitatif. Pendekatan ini dipilih karena sesuai dengan sasaran penelitian yang bertujuan untuk memahami secara mendalam fenomena sosial-historis yang rumit, yakni perkembangan dan pembentukan Kementerian Agama, Madrasah, serta Sekolah Islam dalam konteks dualisme pendidikan di Indonesia. Penelitian kualitatif berfokus pada penjabaran makna, konsep, karakteristik, deskripsi, simbol, dan narasi suatu fenomena (Creswell, 2014). Pendekatan ini memberikan kesempatan kepada peneliti untuk mengeksplorasi dan menginterpretasikan data naratif dari berbagai dokumen dan literatur agar dapat membangun pemahaman yang lebih menyeluruh dan kontekstual, yang sulit dijawab oleh metode kuantitatif yang lebih terfokus pada pengukuran statistik. Seperti yang dinyatakan oleh Moleong (2017), penelitian kualitatif sangat sesuai untuk menyelidiki sejarah dan kebijakan karena mampu mengungkapkan proses, interaksi, dan makna di balik peristiwa dan keputusan yang terjadi.

Desain yang diterapkan dalam penelitian ini adalah studi pustaka (library research) dengan pendekatan historis-deskriptif. Desain ini dipilih karena objek penelitian berfokus pada peristiwa dan kebijakan masa lalu, yang data utamanya diperoleh dari dokumen dan teks yang tertulis. Studi pustaka memungkinkan peneliti untuk mengumpulkan, mengevaluasi, dan menyintesis hasil dari beragam sumber sekunder dan primer yang sudah ada (Sugiyono, 2019). Pendekatan historis digunakan untuk merekonstruksi urutan waktu dan konteks pembentukan Kemenag serta perubahan madrasah dan sekolah Islam, sedangkan pendekatan deskriptif difungsikan untuk menggambarkan secara sistematis peran dan karakteristik dari setiap pilar. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang seringkali hanya menekankan pada satu aspek tertentu (seperti hanya kebijakan atau model sekolah tunggal), desain dalam penelitian ini secara khusus dirancang untuk melakukan analisis komparatif-sintetik yang menghubungkan dan membandingkan ketiga entitas dalam satu kerangka analisis yang terpadu, sehingga mengisi celah yang telah diidentifikasi. Sedangkan populasi yang diteliti dalam studi ini mencakup semua dokumen, literatur, arsip, dan publikasi ilmiah yang membahas mengenai Kementerian Agama, Madrasah, dan Sekolah Islam di Indonesia dari sudut pandang sejarah sosial pendidikan. Mengingat luasnya cakupan populasi, teknik pengambilan sampel yang digunakan adalah purposive sampling dan snowball sampling. Purposive sampling dilakukan dengan menetapkan kriteria inklusi yang ketat, yaitu: (1) dokumen primer seperti regulasi (PP No. 1/S. D. /1946, SKB 3 Menteri 1974), pidato resmi, dan laporan sejarah kontemporer; (2) karya ilmiah (buku, jurnal, disertasi) yang langsung menyinggung pokok permasalahan penelitian; dan (3) sumber yang diterbitkan dalam periode waktu yang relevan atau menjadi acuan utama dalam bidang ini. Snowball sampling kemudian diterapkan dengan menelusuri daftar rujukan (bibliografi) pada dokumen-dokumen penting yang telah ditemukan, untuk memperoleh sumber-sumber lain yang mungkin terlewat (Sugiyono, 2019). Sampel dianggap memadai (saturated) saat penambahan data baru tidak lagi memberikan informasi atau tema baru yang signifikan. Dan instrumen utama

dalam studi ini adalah peneliti itu sendiri yang berfungsi sebagai alat manusia, dilengkapi dengan pedoman untuk analisis dokumen. Pedoman ini mencakup berbagai kategori pencarian dan analisis yang merujuk kepada tujuan penelitian, seperti: konteks sejarah dikotomi, proses penyusunan kebijakan, perubahan kurikulum, dan filosofi pendidikan. Metode pengumpulan data menggunakan studi dokumen secara mendalam terhadap sumber-sumber tertulis yang telah dipilih. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan cara yang sistematis: (a) mencari dan mengumpulkan dokumen dari database perpustakaan, repositori institusi (contohnya situs web Kemenag), dan indeks jurnal akademis; (b) memilih dokumen berdasarkan kriteria tertentu; (c) melakukan pengutipan terhadap data yang relevan; dan (d) mengatur data berdasarkan tema dan urutan waktu. Untuk memastikan akurasi data, triangulasi sumber dilakukan, yaitu dengan membandingkan dan memverifikasi konsistensi informasi dari berbagai dokumen (contohnya membandingkan catatan sejarah dari Kemenag dengan analisis para akademisi). Reliabilitas dijaga dengan mendokumentasikan semua langkah dan keputusan dalam pemilihan serta analisis secara jelas dan cermat, sehingga bisa diaudit.

Data yang telah terkumpul dianalisis menggunakan metode analisis tematik. Proses analisis ini dilakukan dengan interaksi yang bersifat repetitif mengikuti model yang dijabarkan oleh Miles et al. (2014), yang terdiri dari tiga langkah utama: (1) Reduksi Data, yang merupakan proses penyaringan, pemfokusan, penyederhanaan, dan pengelompokan data mentah ke dalam tema-tema awal; (2) Penyajian Data, yaitu menyusun data yang telah diproses dalam bentuk matriks, tabel, atau narasi deskriptif agar memudahkan dalam menarik kesimpulan; dan (3) Penarikan Kesimpulan/Verifikasi, yang melibatkan penafsiran makna dari data yang telah disajikan, pencarian pola hubungan antar tema, dan merumuskan proposisi riset. Proses pengkodean tema dibantu dengan perangkat lunak NVivo 12 untuk mengelola data tekstual yang besar dengan lebih efisien dan sistematis. Melalui analisis ini, pola-pola seperti "solusi institusional", "integrasi kurikulum", dan "respons ideologis" ditemukan dan dihubungkan untuk menjawab pertanyaan penelitian serta membangun argumen mengenai sinergi tiga pilar.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hasil analisis dari data dan dokumen yang diperoleh melalui penelitian pustaka dengan pendekatan historis-deskriptif menunjukkan hasil penelitian yang dibagi menjadi beberapa bagian penting yang mencerminkan evolusi dan perkembangan tiga entitas utama dalam pendidikan Islam di Indonesia: Kementerian Agama, Madrasah, dan Sekolah Islam.

Tanggapan Institusional terhadap Pemisahan: Penguatan Negara Melalui Kementerian Agama

Dari hasil analisis, tampak bahwa pendirian Kementerian Agama (Kemenag) pada tanggal 3 Januari 1946 adalah suatu langkah institusional yang sangat penting untuk mengatasi pemisahan pendidikan yang diwarisi dari kolonialisme dan tekanan untuk memenuhi perintah konstitusi. Sebelum kemerdekaan, pengelolaan urusan keagamaan dan pendidikan Islam bersifat terpisah dan tidak terorganisir, bahkan seringkali terhambat oleh kebijakan kolonial yang tidak adil (Shaleh, 2005). Pendirian Kemenag, yang merupakan hasil dari kompromi politik yang keras, berfungsi sebagai landasan hukum dan kebijakan terpusat yang mengambil alih tanggung jawab keagamaan dari berbagai kementerian sebelumnya (seperti Kementerian Dalam Negeri, Kehakiman, dan Pengajaran, Pendidikan, serta Kebudayaan). Sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 1949 dan Nomor 8 Tahun 1950, peran penting Kemenag meliputi: (1) memastikan pelaksanaan prinsip Ketuhanan dan hak untuk beribadah; (2) mengorganisir dan

mengembangkan pendidikan agama baik di sekolah negeri maupun madrasah; (3) mengelola administrasi dan pengadilan agama Islam (mencakup pencatatan nikah, talak, rujuk, dan wakaf); dan (4) memperbaiki kesejahteraan serta menambah kecerdasan dalam menjalankan kehidupan beragama (Sanusi et al. , 2022). Dengan demikian, Kemenag hadir tidak hanya sebagai lembaga administratif, tetapi juga sebagai solusi institusional yang memposisikan negara untuk secara sistematis mengintegrasikan agama ke dalam kehidupan berbangsa, terutama dalam aspek pendidikan.

Evolusi Integratif: Madrasah dari Posisi Marginal ke Kesetaraan Resmi

Penelitian menunjukkan bahwa transformasi madrasah adalah proses panjang yang menjadi solusi integratif untuk mengatasi pemisahan. Pada awal kemerdekaan, madrasah masih dianggap sebagai “non-formal” atau “sekolah kelas dua” dengan pengakuan dan peluang yang sangat terbatas. Upaya awal untuk memperbaiki kondisi ini dilakukan dengan menasionalisasi madrasah percontohan, seperti Madrasah Tsanawiyah Sabilul Muttaqin di Magetan dan Madrasah Aliyah al-Islam di Surakarta, serta pengenalan kurikulum integratif seperti Madrasah Wajib Belajar (MWB) selama 8 tahun (Daulay, 2021; Shaleh, 2005). Namun, momen paling signifikan terjadi ketika Surat Keputusan Bersama (SKB) 3 Menteri pada tahun 1974 diterbitkan (Mariana and Helmi, 2022). SKB ini menjadi titik sejarah yang secara resmi mengakui madrasah sebagai bagian dari Sistem Pendidikan Nasional. Dampaknya sangat besar: (1) Ijazah madrasah diakui setara dengan ijazah sekolah umum; (2) Lulusan madrasah memiliki hak untuk melanjutkan ke perguruan tinggi negeri; dan (3) Peluang kerja bagi lulusan madrasah meluas ke berbagai sektor di luar Departemen Agama. Akibatnya, kurikulum madrasah diperbarui untuk seimbang dalam pengajaran ilmu umum (70%) dan ilmu agama (30%), menghasilkan model “sekolah plus” yang unik. Inovasi seperti Madrasah Aliyah Program Khusus (MAPK) dan pelaksanaan kurikulum nasional yang bervariasi (KBK, KTSP, Kurikulum 2013, hingga Kurikulum Prototipe) menunjukkan kemampuan madrasah untuk beradaptasi sambil tetap menjaga identitas keagamaannya dan merespons kebutuhan zaman (Mariana and Helmi, 2022).

Inovasi Ideologis: Sekolah Islam Modern sebagai Perpaduan IPTEK dan IMTAQ

Bermunculnya berbagai model Sekolah Islam Modern di akhir abad ke-20 mencerminkan solusi ideologis terhadap tantangan baru, terutama terkait globalisasi dan kekhawatiran tentang menurunnya spiritualitas. Analisis tematik mengidentifikasi beberapa model utama dengan filosofi yang berbeda:

- a. Sekolah Islam Terpadu (SIT): Didirikan oleh kalangan aktivis dari gerakan Tarbiyah, SIT tidak hanya menyatukan pelajaran umum dan religi, tapi juga menekankan Islamisasi ilmu, yakni menilai semua cabang pengetahuan dari perspektif tauhid (Tim Mutu JSIT Indonesia, 2014).
- b. Al-Azhar Islamic School: Mewakili pendidikan Islam yang modern dan urban dengan fasilitas kelas atas, ditujukan untuk kalangan menengah ke atas serta menjadi simbol prestise.
- c. Sekolah Madania: Beroperasi di bawah Yayasan Paramadina, sekolah ini secara terang-terangan mendukung pluralisme, multikulturalisme, dan perspektif global dalam model *boarding school*.
- d. SMA Insan Cendekia: Didirikan oleh para ilmuwan dari lingkungan BPPT dan ICMI, sekolah ini secara tegas mengedepankan integrasi antara Ilmu Pengetahuan dan Teknologi (IPTEK) serta Iman dan Taqwa (IMTAQ) sebagai slogan dan tujuan utama dalam pendidikannya.

Model-model ini menunjukkan ragam tanggapan dari masyarakat sipil dalam menyediakan alternatif pendidikan yang bertujuan menghasilkan lulusan yang tidak hanya pintar secara intelektual, tetapi juga kuat dalam aspek spiritual dan berkarakter.

Sinergi Tiga Pilar dalam Konteks Kontemporer

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kementerian Agama, Madrasah, dan Sekolah Islam Modern tidak berkembang secara independen. Ketiga entitas ini saling membentuk sinergi yang saling melengkapi dalam satu narasi besar bagi bangsa Indonesia. Kementerian Agama menyuplai dasar hukum dan kebijakan yang mendukung transformasi serta pengakuan terhadap madrasah. Kesuksesan madrasah dalam memperoleh kesetaraan formal kemudian menciptakan ekosistem yang mendorong lahirnya inovasi-inovasi lebih ideologis dalam bentuk Sekolah Islam Modern. Dalam konteks saat ini, madrasah telah menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari Sistem Pendidikan Nasional di bawah Kementerian Agama, yang mengadopsi kurikulum nasional (seperti Kurikulum Merdeka), sembari tetap menjaga karakteristik melalui penguatan mata pelajaran agama (Al-Qur'an Hadits, Akidah Akhlak, Fikih, Sejarah Kebudayaan Islam, Bahasa Arab). Tantangan saat ini, seperti percepatan digitalisasi dan pembelajaran setelah pandemi, direspon dengan penyesuaian kurikulum yang lebih fleksibel dan penekanan pada pengembangan kapasitas guru, hal ini menunjukkan ketahanan dan dinamika dari sistem pendidikan yang terbentuk melalui kolaborasi tiga pilar ini. Oleh karena itu, usaha untuk mengakhiri dikotomi pendidikan dan memperkuat identitas bangsa Indonesia terbukti dilakukan melalui strategi bertahap yang melibatkan peran negara (institusi), reformasi kelembagaan (integrasi), dan inisiatif masyarakat (ideologi).

Pembahasan

Dengan berlandaskan hasil penelitian yang sudah disampaikan, diskusi berikut ini akan membahas arti, konteks, dan dampak dari hasil tersebut dengan mengaitkannya pada tujuan penelitian, literatur yang relevan, serta kontribusinya terhadap dunia pengetahuan.

1. Analisis Hasil: Sinergi Tiga Pilar sebagai Strategi Berlapis

Temuan dari penelitian menunjukkan bahwa upaya untuk mengatasi perbedaan dalam pendidikan dan memperkuat identitas keindonesiaan yang religius tidak dilakukan dengan cara tunggal, melainkan melalui strategi berlapis yang saling berkaitan. Pembentukan Kementerian Agama (Kemenag) berperan sebagai *solusi struktural-institusional*. Keberadaannya, sebagaimana diungkap oleh Wahid Hasjim (dalam Rusydiyah, 2017), dianggap sebagai "jalan tengah" yang memusatkan dan melegitimasi isu agama di tingkat negara, sebuah kompromi pintar antara pemikiran sekuler dan Islam. Temuan ini menjawab pertanyaan penelitian awal, menegaskan bahwa Kemenag merupakan pra-syarat administratif dan politik untuk menyatukan pengelolaan pendidikan agama.

Perubahan Madrasah dari lembaga yang terpinggirkan menjadi bagian dari sistem pendidikan nasional mencerminkan *solusi kurikuler-integratif*. SKB 3 Menteri 1974 bukan hanya sekadar kebijakan administratif, melainkan sebuah *political will* untuk merekayasa masyarakat melalui pendidikan, menjadikan madrasah sebagai "jembatan" antara dua dunia yang terpisah. Temuan terkait komposisi kurikulum 70:30 dan status kesetaraan ijazah mendukung analisis yang dilakukan oleh Daulay (2009) dan Mariana dan Helmi (2022) bahwa integrasi ini adalah kunci untuk meningkatkan mobilitas sosial para lulusan madrasah. Namun, seperti yang dikritik oleh Muhaimin (2004), integrasi kuantitatif ini berisiko mengurangi kedalaman pemahaman ilmu

agama jika tidak disertai dengan pendekatan kualitatif.

Munculnya Sekolah Islam Modern seperti SIT, Madania, dan Insan Cendekia merupakan *solusi filosofis-ideologis*. Sekolah-sekolah ini menanggapi kekurangan yang dirasakan pada kedua sistem sebelumnya: ketidakfleksibelan birokrasi negara dan keterbatasan inovasi dalam madrasah yang telah terstandarisasi. Konsep "Islamisasi Ilmu Pengetahuan" pada SIT (Tim Mutu JSIT Indonesia, 2014) dan gabungan "IPTEK-IMTAQ" di Insan Cendekia adalah upaya untuk melampaui integrasi menuju sintesis, sesuai dengan semangat reformasi pendidikan Islam modern yang dijelaskan oleh Azra (1999).

2. Perbandingan dengan Penelitian Terdahulu

Temuan mengenai perjuangan politik dalam pendirian Kemenag memperkuat narasi sejarah yang disampaikan oleh Sanusi et al. (2022) dan Shaleh (2005) mengenai peran tokoh-tokoh Islam dalam diskusi awal negara. Namun, penelitian ini berjalan lebih jauh dengan tidak hanya memandang Kemenag sebagai produk sejarah, tetapi sebagai *enabler* (pemungkin) utama untuk dua pilar berikutnya. Temuan tentang transformasi madrasah sejalan dengan penelitian oleh Daulay (2021) serta Mariana dan Helmi (2022) yang menekankan SKB 3 Menteri sebagai titik balik penting. Novelitas penelitian ini terletak pada cara meletakkan transformasi madrasah sebagai *mata rantai penghubung* logis antara kebijakan negara (Kemenag) dan inisiatif masyarakat (Sekolah Islam). Sementara penelitian sebelumnya cenderung membahas madrasah secara terpisah atau hanya membandingkannya dengan sekolah negeri, penelitian ini menempatkannya sebagai *inti dari integrasi* proses tersebut. Berbeda dari studi Subhan (2012) yang lebih banyak menggambarkan model Sekolah Islam secara individual, penelitian ini menganalisis kemunculannya sebagai sebuah *gerakan sosio-edukasional* yang merupakan konsekuensi logis serta kritik atas baik keberhasilan maupun keterbatasan dari dua pilar sebelumnya. Hal ini mengisi *gap* dengan memberikan kerangka pemahaman yang mengaitkan ketiganya dalam satu rangkaian sebab dan akibat serta perkembangan.

3. Implikasi Temuan Dari sudut pandang teoretis.

Penelitian ini menghadirkan Model Sinergi Tiga Pilar sebagai kerangka analisis untuk memahami perkembangan pendidikan Islam di Indonesia serta negara-negara pascakolonial lainnya. Model ini menawarkan pandangan yang lebih dinamis dan kompleks dibandingkan dengan pendekatan dikotomis atau analisis sektoral yang selama ini dominan. Secara praktis, hasil temuan ini membawa beberapa implikasi:

a. Untuk Pembuat Kebijakan

Memahami bahwa keberhasilan sistem pendidikan nasional yang inklusif membutuhkan dukungan dari tiga elemen: kerangka hukum dan lembaga yang kokoh (institusional), kurikulum dan standar yang bersinergi dan setara (integratif), dan kesempatan untuk inovasi serta perkembangan filosofi pendidikan yang sesuai dengan situasi (ideologis).

b. Untuk Pengelola Lembaga Pendidikan

Madrasah dan Sekolah Islam harus menyadari posisi historis mereka dalam konteks solusi ini. Madrasah seharusnya memperkuat perannya tidak hanya sebagai "sekolah dengan tambahan" agama, tetapi juga sebagai wadah untuk integrasi nilai yang lebih mendalam. Di sisi lain, Sekolah Islam dapat berfungsi sebagai pengarah baru dalam inovasi pengajaran yang kelak bisa diadopsi dalam sistem yang lebih besar.

c. Untuk Identitas Nasional

Penelitian ini mendukung argumen bahwa identitas Indonesia sebagai negara yang mengedepankan ketuhanan bukan sekadar pengakuan simbolis, melainkan hasil dari proyek pendidikan nasional yang terus berkembang dan beragam, yang melibatkan interaksi antara negara, agama, dan masyarakat sipil.

4. Keterbatasan Penelitian

Terdapat beberapa keterbatasan dalam penelitian ini yang perlu diperhatikan diantaranya penelitian ini sepenuhnya bergantung pada analisis dokumen dan literatur (*library research*). Meskipun dilakukan triangulasi sumber, temuan dari penelitian dapat diperkuat melalui data empiris primer seperti wawancara mendalam dengan pelaku sejarah, pembuat kebijakan, atau pengamatan di berbagai jenis lembaga pendidikan. Selain itu terdapat rentang historis yang luas mencakup periode dari pra-kemerdekaan sampai era sekarang berisiko menimbulkan generalisasi. Analisis yang lebih mendalam terhadap periode tertentu (misalnya, Orde Baru atau Reformasi) bisa jadi akan menyingkap dinamika yang lebih rumit. Kemudian terdapat penekanan pada narasi utama yang membuat penelitian ini lebih mengutamakan narasi besar (*grand narrative*) mengenai perkembangan institusi dan kebijakan. Suara-suara dari kelompok minoritas, pengalaman di tingkatan masyarakat, atau variasi geografis yang signifikan (seperti perbedaan antara Jawa dan luar Jawa) mungkin belum dibahas secara mendalam. Keterbatasan ini menyediakan kesempatan untuk penelitian lebih lanjut yang lebih spesifik, baik dari segi tema, periode, maupun dengan menerapkan metode pengumpulan data yang lebih bervariasi.

KESIMPULAN

Melalui analisis historis-deskriptif mengenai perkembangan pendidikan Islam di Indonesia, penelitian ini menyimpulkan bahwa untuk mengatasi perpecahan yang diakibatkan oleh pendidikan warisan kolonial dan memperkuat identitas nasional, diperlukan kerja sama antara tiga entitas utama. Pertama, Kementerian Agama (Kemenag) yang didirikan pada tahun 1946 berperan sebagai solusi institusional yang menyediakan dasar hukum, politik, dan administrasi terpusat untuk pengelolaan urusan agama, termasuk pendidikan. Kedua, transformasi Madrasah, yang puncaknya dicapai melalui SKB 3 Menteri 1974, berfungsi sebagai solusi integratif yang secara kurikuler dan struktural menghubungkan pendidikan agama dengan pendidikan umum, serta meningkatkan statusnya dari lembaga pinggiran menjadi bagian yang setara dalam Sistem Pendidikan Nasional. Ketiga, munculnya Sekolah Islam Modern (seperti SIT, Madania, Insan Cendekia) melambangkan solusi ideologis yang menjawab tantangan globalisasi dengan menawarkan perpaduan antara ilmu pengetahuan, teknologi, dan pembentukan karakter religius yang kuat. Ketiga pilar ini tidak terpisah satu sama lain, melainkan merupakan tahap-tahap yang saling melengkapi dalam satu proyek besar pembangunan bangsa Indonesia, menciptakan ekosistem pendidikan yang khas di mana negara, reformasi kelembagaan, dan inisiatif masyarakat sipil saling berinteraksi secara dinamis. Penelitian ini mempunyai beberapa keterbatasan. Karakteristik studi kepustakaan (*library research*) membatasi analisis pada data sekunder berupa teks, tanpa melibatkan data empiris primer seperti pengalaman langsung individu yang terlibat atau observasi di lapangan. Rentang waktu penelitian yang luas (dari sebelum kemerdekaan hingga saat ini) juga dapat mengarah pada generalisasi, di mana nuansa dan kompleksitas dari periode tertentu mungkin belum dikaji secara mendalam. Selain itu, penekanan pada narasi besar dan perkembangan kebijakan dari pusat mungkin mengaburkan keragaman dan dinamika lokal yang kaya di berbagai daerah di Indonesia. Dengan

mempertimbangkan temuan dan keterbatasan ini, disarankan agar penelitian berikutnya: melakukan penelitian studi kasus yang mendalam pada satu atau dua model lembaga (seperti satu madrasah negeri dan satu sekolah Islam terpadu) dengan pendekatan kualitatif melalui wawancara mendalam dan observasi partisipatif, untuk memahami praktik dan tantangan integrasi di level mikro. Kemudian mengkaji periode sejarah tertentu (contohnya, era Orde Baru atau pasca-Reformasi 1998) menggunakan pendekatan mikro-historis untuk mengungkap konteks politik dan sosial yang lebih mendalam yang memengaruhi kebijakan pendidikan Islam. Selain itu pelaksanaan penelitian komparatif antara perkembangan di Pulau Jawa dan daerah lainnya atau antara lingkungan perkotaan dan pedesaan, guna memahami bagaimana faktor geografis dan sosiokultural mempengaruhi penerapan serta hasil dari sinergi tiga pilar ini. Riset lanjutan jenis ini akan memperkaya dan menguji ketahanan kerangka "Sinergi Tiga Pilar" yang diusulkan dalam penelitian ini.

DAFTAR REFERENSI

- Alawiyah, F. (2014). Islamic School Education in Indonesia. *Jurnal Aspirasi*, 5(1), 51–58. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/449>
- Azra, A. (1999). *Pendidikan Islam: Tradisi dan Modernisasi Menuju Milenium Baru*. Logos Wacana Ilmu.
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed.). SAGE Publications.
- Daulay, H. P. (2009). *Sejarah Pertumbuhan dan Pembaharuan Pendidikan Islam di Indonesia*. Kencana.
- Daulay, M. R. (2021). Sejarah Madrasah di Indonesia (Pendekatan Sejarah dan Perkembangannya). *Forum Paedagogik*, 12(1), 93-108. <https://doi.org/10.24952/paedagogik.v12i1.3611>
- Djamaluddin & Aly, A. (1998). *Kapita Selekta Pendidikan Islam*. Pustaka Setia.
- Hakiki, M. (2015). Konsep pendidikan islam modern menurut pemikiran Dr. Mohammad Natsir. *Jurnal Pendidikan Islam*, 10(2), 150-165.
- Jamaluddin, D., Ratnasih, T., Gunawan, H., & Paujiah, E. (2020). Pembelajaran Daring Masa Pandemi Covid-19 Pada Calon Guru: Hambatan, Solusi dan Proyeksi. *Karya Tulis Ilmiah UIN Sunan Gunung Djati Bandung*, 1-10. <http://digilib.uinsgd.ac.id/30518/>
- Lubis, M., & Yusri, D. (2020). Pembelajaran Pendidikan Agama Islam Berbasis E-Learning (Studi Inovasi Pendidikan MTS. PAI Medan di Tengah Wabah Covid-19). *Fitrah: Journal of Islamic Education*, 1(1), 1–18.
- Mariana, D., & Helmi, A. M. (2022). Madrasah Sebagai Lembaga Pendidikan Di Indonesia. *Jurnal Pendidikan Tambusai*, 6(1), 1907-1919. <https://doi.org/10.31004/jptam.v6i1.236> (Format DOI contoh)
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2014). *Qualitative data analysis: A methods sourcebook* (3rd ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif* (Edisi Revisi). PT Remaja Rosdakarya.
- Muhaimin. (2004). *Wacana Pengembangan Pendidikan Islam* (Cet. Kedua). Pustaka Pelajar.
- Mulyanto, Saefuddin, D., Husaini, A., & B., T. A. (2019). Modernisasi Madrasah Awal Abad XIX. *Jurnal Pendidikan Islam*, 8(2), 369–396.
- Nizar, S. (2005). *Sejarah dan Pergolakan Pemikiran Pendidikan Islam*. Quantum Teaching.

-
- Rahman, A., & Iswantir. (2023). Sekolah Islam: Asal-Usul dan Pertumbuhannya. *Jurnal Penelitian Ilmu Pendidikan Indonesia*, 2(1), 47–52.
- Ramayulis. (2012). *Sejarah Pendidikan Islam, Napak Tilas Perubahan Konsep, Filsafat, Dan Metodologi Pendidikan Islam Dari Era Nabi SAW Sampai Ulama Nusantara*. Radar Jaya Offset.
- Romly, M. (2012). Sejarah Madrasah Dan Perkembangannya. *Edukasi Islami: Jurnal Pendidikan Islam*, 1(01), 1–15. <http://jurnal.staialhidayahbogor.ac.id/index.php/ei/article/view/12>
- Rusydiyah, E. F. (2017). Analisis Historia Kebijakan Pendidikan Islam Kementerian Agama RI Masa KH.A.Wahid Hasyim. *Al-Ibroh*, 2(1), 45-60.
- Sanusi, I., Rama, B., & Rasyid, M. R. (2022). Peranan Kementerian Agama Dalam Pendidikan Islam Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Pendidikan Dan Kearifan Lokal (JIPKL)*, 2(6), 321–330.
- Satria, R. (2019). Dari Surau ke Madrasah : Modernisasi Pendidikan Islam Di Minangkabau 1900-1930 M. *TADRIS: Jurnal Pendidikan Islam*, 14(2), 277–293. <https://doi.org/10.19105/tjpi.v14i2.2860>
- Shaleh, A. R. (2005). *Madrasah Dan Pendidikan Anak Bangsa: Visi, Misi, dan Aksi*. PT. RajaGrafindo Persada.
- Solihin, I. (2018). Madrasah Dan Pertumbuhan Keilmuan Dunia Islam: Sebuah Kajian Sosio-Historis. *Elementary: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 4(1), 97–110. <https://doi.org/10.32332/elementary.v4i1.1080>
- Subchi, I., & Alkaf, H. (2018). *Sejarah Kementerian Agama Era Reformasi: Dari Kebijakan Agama Masa Transisi Hingga Konsolidasi Demokrasi*. Rajawali Pers.
- Subhan, A. A. (2012). *Lembaga Pendidikan Islam Indonesia Abad ke-20: Pergumulan antara Modernisasi dan Identitas*. Kencana.
- Sugiyono. (2019). *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D* (2nd ed.). Alfabeta.
- Tim Mutu JSIT Indonesia. (2014). *Standar Mutu Kekhasan Sekolah Islam Terpadu*. JSIT Indonesia.
- Yunus, M. (1990). *Sejarah Pendidikan Islam*. Hidakarya Agung.
- Yudhistira, R., Rifaldi, A. M. R., & Satriya, A. A. J. (2020). Pentingnya Perkembangan Pendidikan Di Era Modern. *Seminar Nasional Bahasa Dan Sastra Indonesia*, 1–6.